

BAB II

KONSEP DASAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

A. Pengertian Pengelolaan (Manajemen Administrasi)

Istilah pengelolaan sering diidentikan dengan istilah manajemen. Manajemen adalah suatu kemampuan dan keterampilan khusus untuk melakukan suatu kegiatan baik bersama orang lain, atau melalui orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Hersey dan Blanchard menurut Stoner dalam Sudjana (2000:17) member arti pengelolaan sebagai berikut “*Management as working with and through individuals and groups to accomplish organizational goals*” (pengelolaan merupakan kegiatan yang dilakukan bersama dan melalui orang-orang sertakelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi). Sumijo dan soebedjo dalam Sudjana (2000:17) mengemukakan bahwa :”*Management is the process of planning, organizing, leading and controlling the efforts of organizing members and of using all other organizational resources to achieve stated organizational goals*” Kalau kita kaji dari kedua pengertian tersebut di atas, ternyata implementasi dari pengertian tersebut adalah : manajemen merupakan serangkaian kegiatan merencanakan , mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan mengembangkan secara inovatif terhadap segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan

Dari pengertian manajemen di atas, terdapat tiga dimensi yang sangat krusial, yaitu : *Pertama* dalam manajemen terjadi kegiatan yang dilakukan oleh seorang pengelola (pemimpin, kepala, komandan, ketua dan lain sebagainya) berasama orang lain atau kelompok. Hal ini menunjukkan begitu pentingnya kemampuan dan keterampilan khusus yang perlu dimiliki pengelola untuk melakukan hubungan kemanusiaan dengan orang lain dan untuk mempengaruhi orang lain baik melalui hubungan perorangan maupun melalui hubungan kelompok. Kemampuan dan keterampilan khusus tersebut dapat terlihat pada interaksi antara pihak yang memimpin/pengelola dan pihak yang dipimpin/staf atau bawahan.

Hubungan kemanusiaan ini terjadi apabila pihak yang memimpin dan yang dipimpin itu terdiri atas kelompok. *Kedua*, menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan bersama dan melalui orang lain itu mempunyai tujuan yang akan dicapai. Dimensi ini member makna bahwa kegiatan tersebut diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau disepakati bersama. Sedangkan dimensi ketiga adalah, bahwa pengelolaan itu dilakukan dalam organisasi, sehingga tujuan yang akan dicapai itu merupakan tujuan organisasi. Dengan kata lain tujuan organisasi dicapai melalui kegiatan yang dilakukan bersama orang lain baik perorangan maupun kelompok. Jadi tiga dimensi tersebut meliputi kegiatan melalui dan/atau bersama orang lain – tujuan yang akan dicapai dalam kehidupan organisasi, memerlukan kehadiran pengelola yang memiliki kemampuan dan keterampilan tentang hubungan kemanusiaan untuk mempengaruhi orang-orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Istilah administrasi berasal dari kata *Ad (latin) = To (Inggris) = kepada dan Ministrare (latin) = to serve / to conduct = melayani, membantu, menolong, mengarahkan*. Jadi administrasi merupakan suatu usaha untuk membantu, menolong, mengarahkan semua kegiatan didalam mencapai tujuan tertentu. Secara sempit administrasi dapat diartikan pekerjaan tulis menulis dikantor, atau pekerjaan surat menyurat Tata usaha/ tata laksana. Secara luas administrasi dapat berarti sebagai suatu proses keseluruhan dari semua kegiatan bersama dengan memanfaatkan semua fasilitas, yang tersedia baik material, personal maupun spiritual dalam usaha mencapai tujuanbersama secara efektif dan efisien.

Pendapat lain mengatakan bahwa administrasi berasal dari kata *administratie* (bahasa Belanda) yang berarti pemerintah atau pemerintahan di suatu negara, termasuk badan-badan pemerintah lainnya di dalam negara tersebut. Istilah tersebut sama dengan *public administration* atau administrasi negara. Fenomena yang terkandung dalam pengertian tersebut adalah :

1. Terjadinya proses penyelenggaraankerjasama dalam kelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Proses penyelenggaraan tersebut diatur oleh pemerintah untuk mencapai tujuan negara yaitu untuk melayani kepentingan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupannya seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, dan keamanan.

Untuk menyelenggarakan pelayanan secara maksimal terhadap masyarakat, pimpinan memerlukan persyaratan sebagai berikut :

1. Pimpinan atau administrator memiliki wawasan yang lebih luas tentang kemasyarakatan dan memahami peranan, kebutuhan, aspirasi dan potensi orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Pimpinan mempunyai kemampuan berpikir abstrak baik dalam mengestimasi berbagai kecenderungan yang terjadi dalam kelompok dan lingkungannya yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan, maupun dalam memikirkan dan menganalisa fakta dan interaksi sosial di dalam dan di luar organisasi.
3. Pimpinan memiliki keseimbangan antara emosi dan persepsi dalam mempertimbangkan dan memahami kebutuhan, harapan, tujuan, dan keinginan diri dan masyarakat sehingga ia dapat menampilkan kepribadian yang harmonis

Siagian dalam Sudjana (2000:16) mengatakan bahwa administrasi sebagai suatu keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas alasan-alasan tertentu dalam upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dimensi yang terkandung dalam makna administrasi sebagaimana dikemukakan tadi adalah pertama administrasi sebagai proses dan kedua administrasi sebagai seni. Administrasi sebagai proses ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya kegiatan kerjasama antara dua orang atau lebih.
2. Adanya tujuan yang akan dicapai melalui kegiatan kerjasama itu.
3. Tersedianya sumber-sumber dan fasilitas yang akan digunakan dalam melakukan kegiatan tersebut.

Sebagai seni, administrasi hanya dikenali pada saat permulaan suatu kegiatan saja, sedangkan bagaimana kegiatan akhir administrasi itu sulit untuk diketahui.

Dengan kata lain bagaimana kegiatan akhir suatu administrasi tidak dapat diketahui

karena di satu pihak, mungkin suatu kegiatan itu akan diikuti dengan kegiatan lainnya. Di pihak lain, diasumsikan ada faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi administrasi. Jadi administrasi sebagai proses dan seni itu saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya.

Merujuk pada pengertian manajemen dan administrasi sebagaimana dikemukakan di atas, terkandung persamaan di dalam pengertian itulah tersebut, yaitu :

1. Manajemen maupun administrasi memerlukan suatu kerjasama antara dua orang atau lebih. Kerjasama itu didasarkan atas alasan-alasan rasional, seperti untuk memenuhi kebutuhan, minat, atau kepentingan bersama.
2. Tujuan organisasi yang ingin dicapai ditentukan secara rasional. Tujuan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan perlunya alasan-alasan untuk bekerjasama sebagaimana telah diketengahkan di atas dan dengan mengkaji potensi dan daya dukung yang tersedia atau yang dapat diseiakan.
3. Administrator dan pengelola tidak menjalankan sendiri kegiatan operasional. Kegiatan operasional itu biasanya dilakukan oleh para pelaksana baik perorangan maupun kelompok.

Unsur perbedaan yang terdapat dalam istilah/pengertian manajemen dan administrasi adalah :

1. Administrasi memiliki fungsi untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai, dan menetapkan berbagai kebijaksanaan umum guna mencapai tujuan tersebut. Sedangkan manajemen memiliki fungsi untuk merencanakan, menyelenggarakan, dan menilai kegiatan dalam mencapai tujuan organisasi/lembaga. Kegiatan dalam manajemen itu ada dalam ruang lingkup kebijaksanaan umum yang dirumuskan dalam administrasi.
2. Fungsi administrasi bersifat menyeluruh dan berlaku untuk semua organisasi, sedangkan fungsi manajemen dibatasi dalam suatu organisasi/lembaga. Jadi Administrasi memiliki cakupan yang luas apabila kita bandingkan dengan cakupan manajemen.

Pada administrasi dan manajemen terdapat unsur kepemimpinan. Kepemimpinan tercermin dalam interaksi, saling hubunga, atau kerjasama antara manusia baik antara seseorang dengan orang lain maupun antara seseorang dengan kelompok. Dalam interaksi terjadi upaya seseorang atau satu pihak untuk mempengaruhi orang/atau pihak lainnya. Upaya mempengaruhi orang lain termasuk pada kepemimpinan. Penjelasan secara rinci tentang kepemimpinan akan dibahas pada Bab VII berikut.

B. Pengertian Pendidikan

1. Batasan tentang Pendidikan

Batasan tentang pendidikan yang dibuat oleh para ahli beraneka ragam, dan kandungannya berbeda yang satu dari yang lain. Perbedaan tersebut mungkin karena orientasinya, konsep dasar yang digunakan, aspek yang menjadi tekanan, atau karena falsafah yang melandasinya.

a. Pendidikan sebagai Proses transformasi Budaya

Sebagai proses transformasi budaya, pendidikan diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Nilai-nilai budaya tersebut mengalami proses transformasi dari generasi tua ke generasi muda. Ada tiga bentuk transformasi yaitu nilai-nilai yang masih cocok diteruskan misalnya nilai-nilai kejujuran, rasa tanggung jawab, dan lain-lain.

b. Pendidikan sebagai Proses Pembentukan Pribadi

Sebagai proses pembentukan pribadi, pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. Proses pembentukan pribadi melalui 2 sasaran yaitu pembentukan pribadi bagi mereka yang belum dewasa oleh mereka yang sudah dewasa dan bagi mereka yang sudah dewasa atas usaha sendiri.

c. Pendidikan sebagai Proses Penyiapan Warganegara

Pendidikan sebagai penyiapan warganegara diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik.

d. Pendidikan sebagai Penyiapan Tenaga Kerja

Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. Pembekalan dasar berupa pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan kerja pada calon luaran. Ini menjadi misi penting dari pendidikan karena bekerja menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia.

e. Definisi Pendidikan Menurut GBHN

GBHN 1988(BP 7 pusat, 1990: 105) memberikan batasan tentang pendidikan nasional sebagai berikut: pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

2. Tujuan dan proses Pendidikan

a. Tujuan pendidikan

Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Pendidikan memiliki dua fungsi yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan.

b. Proses pendidikan

Proses pendidikan merupakan kegiatan mobilitas segenap komponen pendidikan oleh pendidik terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan. Kualitas proses pendidikan menggejala pada dua segi, yaitu kualitas komponen dan kualitas pengelolaannya, pengelolaan proses pendidikan meliputi ruang lingkup makro, meso, mikro. Adapun tujuan utama pengelolaan proses pendidikan yaitu terjadinya proses belajar dan pengalaman belajar yang optimal.

3. Konsep Pendidikan Sepanjang Hayat (PSH)

PSH bertumpu pada keyakinan bahwa pendidikan itu tidak identik dengan persekolahan, PSH merupakan sesuatu proses berkesinambungan yang berlangsung sepanjang hidup. Ide tentang PSH yang hampir tenggelam, yang dicetuskan 14 abad yang lalu, kemudian dibangkitkan kembali oleh comenius 3 abad yang lalu (di abad 16). Selanjutnya PSH didefinisikan sebagai *tujuan atau ide formal untuk pengorganisasian dan penstrukturan pengalaman pendidikan. Pengorganisasian dan penstrukturannya ini diperluas mengikuti seluruh rentangan usia, dari usia yang paling muda sampai paling tua.*(Cropley:67)

Berikut ini merupakan alasan-alasan mengapa PSH diperlukan:

- a. Rasional
- b. Alasan keadilan
- c. Alasan ekonomi
- d. Alasan faktor sosial yang berhubungan dengan perubahan peranan keluarga, remaja, dan emansipasi wanita dalam kaitannya dengan perkembangan iptek.
- e. Alasan perkembangan iptek
- f. Alasan sifat pekerjaan

4. Kemandirian dalam belajar

a. Arti dan prinsip yang melandasi

Kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsungnya lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari pembelajaran. Konsep kemandirian dalam belajar bertumpu pada prinsip bahwa individu yang belajar akan sampai kepada perolehan hasil belajar.

b. Alasan yang menopang

Conny Semiawan, dan kawan-kawan (Conny S. 1988; 14-16) mengemukakan alasan sebagai berikut:

- 1) Perkembangan iptek berlangsung semakin pesat sehingga tidak mungkin lagi para pendidik(khususnya guru) mengajarkan semua konsep dan fakta kepada peserta didik.
- 2) Penemuan iptek tidak mutlak benar 100%, sifatnya relatif.

- 3) Para ahli psikologi umumnya sependapat, bahwa peserta didik mudah memahami konsep-konsep yang rumit dan abstrak jika disertai dengan contoh-contoh konkret dan wajar sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi dengan mengalami atau mempraktekannya sendiri.
- 4) Dalam proses pendidikan dan pembelajaran pengembangan konsep seyogyanya tidak dilepaskan dari pengembangan sikap dan penanaman nilai-nilai ke dalam diri peserta didik.

UNSUR-UNSUR PENDIDIKAN

Proses pendidikan melibatkan banyak hal yaitu:

1. Subjek yang dibimbing (peserta didik).
2. Orang yang membimbing (pendidik)
3. Interaksi antara peserta didik dengan pendidik (interaksi edukatif)
4. Ke arah mana bimbingan ditujukan (tujuan pendidikan)
5. Pengaruh yang diberikan dalam bimbingan (materi pendidikan)
6. Cara yang digunakan dalam bimbingan (alat dan metode)
7. Tempat dimana peristiwa bimbingan berlangsung (lingkungan pendidikan)

Penjelasan:

1. Peserta Didik

Peserta didik berstatus sebagai subjek didik. Pandangan modern cenderung menyebutkan demikian oleh karena peserta didik adalah subjek atau pribadi yang otonom, yang ingin diakui keberadaannya.

Ciri khas peserta didik yang perlu dipahami oleh pendidik ialah:

- a. Individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas, sehingga merupakan insan yang unik.
- b. Individu yang sedang berkembang.
- c. Individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi.
- d. Individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri.

2. Orang yang membimbing (pendidik)

Yang dimaksud pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Peserta didik mengalami

pendidikannya dalam tiga lingkungan yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Sebab itu yang bertanggung jawab terhadap pendidikan ialah orang tua, guru, pemimpin program pembelajaran, latihan, dan masyarakat.

3. Interaksi antara peserta didik dengan pendidik (interaksi edukatif)

Interaksi edukatif pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Pencapaian tujuan pendidikan secara optimal ditempuh melalui proses berkomunikasi intensif dengan manipulasi isi, metode, serta alat-alat pendidikan.

4. Ke arah mana bimbingan ditujukan (tujuan pendidikan)

a. Alat dan Metode

Alat dan metode diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan ataupun diadakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Secara khusus alat melihat jenisnya sedangkan metode melihat efisiensi dan efektifitasnya. Alat pendidikan dibedakan atas alat yang preventif dan yang kuratif.

b. Tempat Peristiwa Bimbingan Berlangsung (lingkungan pendidikan)

Lingkungan pendidikan biasanya disebut tri pusat pendidikan yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat.

5. Jenis pendidikan di Indonesia

Pendidikan di Indonesia terbagi menjadi tiga bentuk pendidikan yaitu pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal

- a. Pendidikan formal yang sering disebut pendidikan persekolahan, berupa rangkaian jenjang pendidikan yang telah baku, misalnya SD, SMP, SMA, dan PT.
- b. Pendidikan nonformal lebih difokuskan pada pemberian keahlian atau skill guna terjun ke masyarakat.
- c. Pendidikan informal adalah suatu fase pendidikan yang berada di samping pendidikan formal dan nonformal.

Pada pendidikan formal juga terdapat dua jenis pendidikan yaitu pendidikan formal untuk anak-anak normal seperti SD, SMP, SMA selain itu ada juga pendidikan formal untuk anak-anak berkebutuhan khusus seperti SDLB, SMPLB, dan SMALB.

C. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus

Paradigma baru dalam dunia Pendidikan Luar Biasa (*special education*) telah mulai bergeser pada Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (*special needs education*) yang cakupannya lebih luas, menjangkau seluruh jenis anak yang memiliki kesulitan belajar. Pendidikan Luar Biasa umumnya hanya menargetkan pada anak- tunanetra, tunarungu, tunagrahita dan tunadaksa, itupun tidak selalu memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Cakupan dari Pendidikan Anak Berkebutuhan khusus meliputi seluruh anak yang memiliki kesulitan belajar, termasuk anak yang mempunyai kesulitan dalam berbahasa, membaca, menulis, dan /atau matematika, anak yang dianggap nakal dan dikucilkan akibat keadaan sosial, emosional, ekonomi atau politik dapat dilayani melalui pendidikan anak berkebutuhan khusus. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 Pasal 32 ayat 1 mengisyaratkan bahwa Pendidikan Khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelaian fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pengajaran” yang diperkuat lagi oleh Undang-undang Pendidikan tentang Pendidikan dan pengajaran luar biasa, serta Deklarasi hak anak yang berbunyi :

The child that is hungry must be food. The child that is sick must be nursed. The child that is physically and mentally handicaped must be helped. The maladjusted child must be reeducated. The orphan and the waif must be sheltered and secured.

Anak Luar Biasa (ALB) yang kini dikenal dengan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) memiliki berbagai jenis, seperti yang dikemukakan oleh Program Direktorat Pembina SLB, Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas (2006 :10) yaitu :

- A. Tunanetra,
- B. Tunarungu,
- C. Tunagrahita,
 - C. Tunagrahita Ringan (IQ = 50 – 70)
 - C1: Tunagrahita Sedang (IQ = 25 – 50)
 - C2: Tunagrahita Berat (IQ = < 25)
- D. Tunadaksa,
 - D. : Tunadaksa Ringan
 - D1 : Tunadaksa Sedang
- E. Tunalaras,
- F. Tunawicara,
- G. Tunaganda.
- H. HIV AIDS
- I. Gifted : Potensi Kecerdasan Istimewa (IQ >125)
- J. Talented : Potensi Bakat Istimewa (Multiple Intelligences : Language, Logico- mathematic, Visuo-spatial, Bodily-Kinesthetic, Musical, Interpersonal, Intrapersonal, Natural, Spiritual)
- K. Kesulitan Belajar (a.l Hyperaktif, ADD/ADHD)
 - Disleksia/Baca, Dysgraphia/Tulis, Dyscalculia/Hitung,
 - Dysphasia/Bicara, Dyspraxia/Motorik
- L. Lambat Belajar (IQ = 70 – 90)
- M. Autis
- N. Korban Penyalahgunaan Narkoba
- O. Indigo

Pendidikan Luar Biasa

Pendidikan Luar Biasa (PLB) adalah pendidikan yang khusus diselenggarakan bagi peserta didik yang menyandang kelainan fisik, mental, perilaku atau gabungan diantaranya. PLB bertujuan membantu peserta didik yang menyandang kelainan fisik, mental atau keduanya agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau mengikuti pendidikan lanjutan.

Tujuan PLB yaitu:

- a. mengembangkan kehidupan anak didik dan siswa sebagai pribadi sekurang-kurangnya mencakup upaya untuk memperkuat keimanan dan ketaqwaan, membiasakan berperilaku yang baik, memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar, memelihara kesehatan jasmani dan rohani, memberikan kemampuan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian yang mantap dan mandiri,
- b. mengembangkan kehidupan anak didik dan siswa sebagai anggota masyarakat yang sekurang-kurangnya mencakup upaya untuk memperkuat kesadaran hidup beragama dalam masyarakat, menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam lingkungan hidup, memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,
- c. mempersiapkan siswa untuk dapat memiliki keterampilan sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja dan
- d. mempersiapkan anak didik dan siswa untuk mengikuti pendidikan lanjutan dalam menguasai isi kurikulum yang disyaratkan.

Jenis kelainan peserta didik berdasarkan PP RI No. 27 tahun 1991 tentang PLB disebutkan yaitu terdiri atas kelainan fisik yang meliputi tuna netra, tuna rungu, tuna daksa. Kelainan mental yang meliputi tuna grahita ringan, tuna grahita sedang, kelainan perilaku yaitu tuna laras atau gabungan diataranya. Mereka yang menderita kelainan tersebut dididik dalam satuan pendidikan yang berbentuk TK Luar Biasa, SD Luar Biasa, SLTP Luar Biasa, SM Luar Biasa atau bentuk lain yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan.

Dalam penjelasan PP tersebut di atas juga dirinci maksud dari berbagai tuna tersebut. *Tuna netra* adalah kerusakan atau cacat mata yang mengakibatkan seseorang tidak dapat melihat atau buta. *Tuna rungu* adalah kerusakan atau cacat pendengaran yang mengakibatkan seseorang tak dapat mendengar atau tuli atau pekak. *Tuna daksa* adalah cacat tubuh. *Tuna grahita* adalah keterbatasan mental dan termasuk di sini adalah keterbelakangan mental ringan dan keterbalekangan mental sedang. *Tuna laras* adalah gangguan atau hambatan atau kelainan tingkah laku sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Isi kurikulum PLB sedapat mungkin disesuaikan dengan isi kurikulum sekolah pada umumnya dengan memperhatikan keterbatasan kemampuan belajar para siswa yang bersangkutan pada jenjang pendidikan tertentu. Kurikulum PLB dapat dilihat pada lampiran 1.

Dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa diatur penyelenggaraan PLB yaitu dapat diselenggarakan melalui pendidikan terpadu, kelas khusus, guru kunjung dan atau bentuk pelayanan pendidikan lainnya. Pendidikan terpadu merupakan pendidikan bagi anak berkelainan yang diselenggarakan bersama-sama anak normal di jalur pendidikan sekolah. Kelas khusus merupakan kelompok belajar pada SD, SLTP dan Sekolah Menengah bagi siswa berkelainan dalam rangka memperoleh pelayanan pendidikan khusus hingga tamat. Guru kunjung merupakan guru pada TKLB, SDLB, SLTPLB dan SMLB yang diberi tugas mengajar pada kelompok belajar bagi anak berkelainan yang tidak dapat terjangkau oleh satuan PLB dalam rangka wajib belajar.

Kondisi Terkini PLB di Indonesia

Dalam rangka melaksanakan kebijakan program PLB sesuai Keputusan Mendiknas No. 010/O/2000 tentang Organisasi Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah yang salah satunya menyatakan terbentuknya Direktorat rumusan PLB mempunyai visi dan misi sebagai berikut

Visi:

Terwujudnya pelayanan yang optimal bagi anak yang berkebutuhan khusus sehingga dapat mandiri dan dapat berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Misi:

- a. Memperluas kesempatan bagi semua anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh PLB sesuai dengan potensi dan kemampuan dasar yang dimiliki baik melalui pendidikan secara segregasi maupun terpadu/inklusi.
- b. Meningkatkan mutu dan relevansi PLB baik pengetahuan pengalaman, atau ketrampilan, sehingga para peserta didik memiliki bekal keimanan, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai dalam memasuki kehidupan dalam masyarakat.
- c. Meningkatkan manajemen dan kapasitas pengelola dan pembina, serta guru, dan tenaga kependidikan lainnya pada PLB sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal dan profesional terhadap peserta didik dan masyarakat.
- d. Memperluas jejaring (networking) dalam upaya mengembangkan dan mensosialisasikan PLB.

Tujuan:

- a. Mensukseskan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun bagi anak berkebutuhan khusus dengan meningkatkan program perluasan kesempatan belajar bagi anak berkebutuhan khusus yang berpedoman pada azas pemerataan.
- b. Mewujudkan iklim masyarakat belajar bagi kalangan orang tua, anak, maupun masyarakat.
- c. Meningkatkan kepedulian dan partisipasi orang tua dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
- d. Meningkatkan usaha peningkatan mutu PLB melalui pengadaan sarana prasarana, peningkatan kualitas guru, peningkatan pembinaan PLB sesuai dengan kurikulum yang berlaku, penanaman wawasan imtaq dan iptek serta penataan kelembagaan.

Sasaran:

- a. Tertampungnya anak berkebutuhan khusus usia sekolah pada lembaga pendidikan luar biasa dan pendidikan umum yang ada.
- b. Tersedianya sarana prasarana, sumber dan bahan belajar serta tenaga kependidikan luar biasa yang bermutu dan cukup jumlah (memadai).
- c. Tersedianya beasiswa bagi anak berkebutuhan khusus yang berprestasi dan kurang mampu dalam rangka mensukseskan wajib belajar.
- d. Terwujudnya peranserta dan kerjasama antara sekolah dan masyarakat, dunia usaha, maupun dunia industri.
- e. Terciptanya iklim belajar yang mendukung terwujudnya masyarakat belajar dalam rangka pemerataan kesempatan belajar khususnya bagi anak berkebutuhan khusus.

Program penyelenggaraan PLB yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Direktorat PLB antara lain:

- a. Upaya Penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun.
Perluasan kesempatan belajar bagi anak berkebutuhan khusus usia sekolah mulai dari tingkat sekolah dasar sampai dengan tingkat menengah melalui pengembangan pendidikan terpadu dan pengadaan tenaga khusus pengelola pendidikan luar biasa.
- b. Peningkatan Mutu PLB Upaya peningkatan mutu PLB melalui :
 - 1) Peningkatan mutu dan kualifikasi guru sekolah luar biasa melalui pelatihan dan penyetaraan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya, serta usaha peningkatan pendidikan akademik baik di dalam maupun di luar negeri.
 - 2) Penyediaan buku-buku teks baik dalam tulisan huruf awas maupun braille yang mengacu pada kurikulum PLB, penyediaan sarana dan prasarana PLB, dan pelaksanaan EBTA SLB Khusus secara nasional.
 - 3) Pembinaan dan pengembangan center percetakan Braille dengan tujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana belajar yang lebih lengkap, tepat waktu, dan berkualitas baik.
- c. Pengembangan Pendidikan Inklusi. Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang mengikutsertakan anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-

sama dengan anak-anak sebayanya di sekolah umum, dan pada akhirnya mereka menjadi bagian dari masyarakat sekolah tersebut, sehingga tercipta suasana belajar yang kondusif. Upaya pendidikan inklusi harus diwujudkan di Indonesia, hal ini dilandasi bahwa semua manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama

- d. Pengembangan Pendidikan untuk Anak Autisme Autisme adalah gangguan perkembangan yang kompleks menyangkut komunikasi, interaksi sosial, dan aktivitas imajinasi/simbolik. Dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi anak autisme memerlukan cara atau metode khusus sehingga mereka mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya. Berdasarkan pemikiran tersebut maka Direktorat PLB perlu memfasilitasi agar anak-anak autisme mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya
- e. Resource Center. Resource Center dalam implementasinya adalah SLB-A Negeri dan Swasta yang ditunjuk untuk menjadi pusat pencetakan buku pelajaran maupun buku-buku referensi bagi siswa dan kaum tuna netra di masyarakat dalam huruf Braille. Tujuannya adalah agar kaum tuna netra dapat menguasai ilmu pengetahuan dan dunia lewat bacaan perabaan timbul yang dihasilkan oleh mesin Braille dari Norwegia
- f. Pusat Pelayanan Pendidikan bagi Siswa Penderita Narkoba Model layanan pendidikan harus berpijak pada misi utama : pertama, model layanan pendidikan harus mengejawantah sebagai wujud pemenuhan hak belajar siswa penderita.

Kedua, model layanan pendidikan harus mampu mengembalikan atau memulihkan prakondisi psikologis siswa penderita untuk tetap belajar sebagai upaya meningkatkan kembali self-esteem-nya yang sempat terganggu karena pengaruh narkoba. Bahkan bukan tidak mungkin bahwa proses pembelajaran sekaligus dapat merupakan terapi non-medis bagi upaya pemulihan kondisi psikis siswa penderita.

- a. Sheltered Workshop

Guna memenuhi tuntutan pasar tenaga kerja dan membudayakan hidup berwirausaha maka konsep life skills education di sekolah merupakan wacana baru dalam pengembangan program pendidikan dan sejak lama menjadi perhatian para pakar kurikulum. Life Skills merupakan salah satu fokus analisis

dalam pengembangan kurikulum pendidikan sekolah yang menekankan pada kecakapan atau keterampilan hidup atau bekerja.

- b. Pendidikan Keterampilan bagi Lulusan SLTPLB dan SMLB Pendidikan keterampilan bagi para lulusan SLTPLB dan SMLB yang diberikan, sesuai dengan kemampuan fisik dan minat anak yang mengacu pada kurikulum PLB tahun 1994. Keterampilan ini diberikan sebagai bekal mereka untuk hidup mandiri di masyarakat. Pelaksanaanya dilakukan di suatu center yang dilengkapi dengan fasilitas asrama, praktik penjualan produk dalam bentuk koperasi, dan sarana lain yang mencakup dunia usaha/industri. Jenis keterampilan yang diajarkan antara lain mesin otomotif, jahit menjahit, pertukangan, dan menganyam. Proses pendidikan keterampilan bagi lulusan SLTPLB/SMLB direncanakan akan dilakukan di suatu tempat penampungan atau home base atau bengkel kerja dengan kriteria sbb :

Proses pendidikan dan latihan :

1. Peserta adalah lulusan SLTPLB atau SMLB
2. Lama DikLat 6 bulan
3. Keterampilan yang diikuti sesuai minat dan bakat
4. Pelaksanaan DikLat 40 % teori 60 % praktik
5. Instruktur dari guru keterampilan dan dari dunia usaha/industri
6. Peralatan dan bahan praktik menggunakan bahan lokal yang mudah didapat di sekitar atau dapat juga memanfaatkan limbah.

Proses kerjasama dengan dunia usaha/industri

1. Dunia usaha dan dunia industri diharapkan membantu menyediakan bahan peralatan dan instruktur
2. Peserta diklat dapat bekerja secara magang selama 6 bulan sesuai dengan bidang keterampilannya
3. Setelah selesai mengikuti diklat, peserta memperoleh sertifikat dan dapat dipertimbangkan untuk bekerja di dunia usaha sesuai dengan bidang keterampilannya.

Program Percepatan Belajar (akselerasi)

Program percepatan belajar merupakan salah satu model pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa (Gifted dan Talented). Penggunaan istilah kemampuan dan kecerdasan luar biasa ini berkaitan erat dengan latar belakang teoritis yang digunakan, kecerdasan berhubungan dengan perkembangan intelektual, sedang kemampuan luar biasa tidak hanya terbatas pada kemampuan intelektual, namun juga beberapa jenis kemampuan lainnya misalnya linguistik, musikal, spasial, logikal-matematis, kinestetik, intrapersonal, dan interpersonal.

Pemberian Beasiswa

Direktorat PLB memberikan bantuan beasiswa kepada siswa SLB/SDLB dengan tujuan:

1. meringankan beban orang tua siswa
2. memberi motivasi kepada siswa untuk lebih giat belajar
3. memberi motivasi kepada orangtua untuk lebih memperhatikan pendidikan anaknya
4. mendorong sekolah untuk lebih memberikan pelayanan pendidikan.

Berdasarkan statistik persekolahan PLB 1999/2000 menunjukkan bahwa hanya sebanyak 37.460 anak cacat saja yang telah mendapat pelayanan pendidikan negeri dan swasta. Sementara itu anak-anak berbakat belum mendapatkan perhatian secara khusus. Jumlah itu menyebar pada TKPLB 7.009 siswa SDPLB 23.669 siswa, SLTPPLB 5.157 siswa, SMPLB 1.625 siswa. Semuanya tertampung di dalam 868 sekolah dengan rincian PLB Negeri sebanyak 36 sekolah atau 4,15 % yang menampung sebanyak 3.081 siswa atau 8,22 % dan PLB swasta sebanyak 832 sekolah atau 95,85 % yang menampung 34.379 siswa atau 91,78 %.

Perkembangan sejarah pendidikan bagi anak penyandang cacat, yang secara resmi disebut pendidikan luar biasa (PLB), selama beberapa dekade yang lalu telah mengalami banyak perubahan. Perubahan-perubahan itu terjadi dalam hal kesadaran dan sikap masyarakat terhadap anak penyandang cacat dan pendidikannya, metodologi dan perubahan konsep yang digunakan.

Sejarah menunjukkan pula bahwa selama berabad-abad di semua negara di dunia, individu yang berbeda dari kebanyakan individu lainnya selalu ditolak kehadirannya oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh adanya anggapan bahwa anggota kelompok yang terlalu lemah (penyandang cacat) tidak mungkin dapat berkontribusi terhadap kelompoknya. Mereka yang berbeda karena menyandang kecacatan, disingkirkan, tidak memperoleh sentuhan kasih sayang dan kontak sosial yang bermakna. Keberadaan penyandang cacat tidak diakui oleh masyarakatnya.

Ketidaktahuan orang tua dan masyarakat pada masa lalu, mengenai hakekat dan penyebab kecacatan dapat menimbulkan rasa takut, sehingga berkembang macam-macam kepercayaan dan tahayul, misalnya seorang ibu yang melahirkan anak penyandang cacat merupakan hukuman baginya atas dosa-dosa nenek moyangnya. Oleh sebab itu di masa lampau anak-anak penyandang cacat sering disembunyikan oleh orang tuanya, sebab memiliki anak penyandang cacat merupakan aib keluarga. Peradaban manusia terus berkembang, pemahaman dan pengetahuan baru mengajarkan kepada manusia bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk hidup. Pandangan seperti inilah yang berhasil menyelamatkan kehidupan anak-anak penyandang cacat. Menyelamatkan hidup anak-anak penyandang cacat menjadi penting karena dipandang sebagai simbol dari sebuah peradaban yang lebih maju dari suatu bangsa, meskipun anak penyandang cacat membutuhkan bantuan ekstra (Miriam, 2001). Pandangan masyarakat dan orang tua yang menganggap bahwa memelihara dan membesarkan anak merupakan investasi agar kelak anak dapat membalas jasa orang tuanya, menjadi tidak dominan.

Anak penyandang cacat mulai diakui keberadaannya, dan oleh sebab itu mulai berdiri sekolah-sekolah khusus, rumah-rumah perawatan dan panti sosial yang secara khusus mendidik dan merawat anak-anak penyandang cacat. Mereka yang menyandang kecacatan, dipandang memiliki karakteristik yang berbeda dari orang kebanyakan, sehingga dalam pendidikannya mereka memerlukan pendekatan dan metode yang khusus pula sesuai dengan karakteristiknya. Oleh sebab itu, pendidikan anak penyandang cacat harus dipisahkan (di sekolah khusus) dari pendidikan anak lainnya. Konsep pendidikan seperti inilah yang disebut dengan konsep *Special Education*, yang melahirkan sistem pendidikan segregasi.

Di Indonesia, sistem pendidikan segregasi sudah berlangsung selama satu abad lebih, sejak dimulainya pendidikan anak tunanetra pada tahun 1901 di Bandung. Konsep special education dan sistem pendidikan segregasi lebih melihat anak dari segi kecacatannya (labeling), sebagai dasar dalam memberikan layanan pendidikan. Oleh karena itu terjadi dikotomi antaran pendidikan khusus (PLB) dengan pendidikan reguler. Pendidikan khusus dan pendidikan reguler dianggap dua hal yang sama sekali berbeda. Dilihat dari sudut pandang, pedagogis, psikologis dan filosofis, sistem pendidikan segregasi, (yang lahir dari konsep special education) mengandung beberapa kelemahan dan tidak menguntungkan baik bagi individu penyandang cacat itu sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya. Secara pedagogis, sistem pendidikan segregasi mengabaikan eksistensi anak sebagai individu yang unik dan holistik, sementara itu kecacatan anak lebih ditonjolkan. Secara psikologis, sistem segregasi, kurang memperhatikan kebutuhan dan perbedaan individual. Ada kesan menyeragamkan layanan pendidikan anak berdasarkan kecacatan yang disandangnya. Secara filosofis sistem pendidikan segregasi menciptakan dikotomi masyarakat eksklusif normal dan tidak normal. Padahal sesungguhnya secara filosofis, penyandang cacat merupakan bagian dari masyarakat yang alami (David Smith 1995).

Konsep dan pemahaman terhadap pendidikan anak penyandang cacat terus berkembang, sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat. Pemikiran yang berkembang saat ini, melihat persoalan pendidikan anak penyandang cacat dari sudut pandang yang lebih bersifat humanis, holistik, perbedaan individu dan kebutuhan anak menjadi pusat perhatian. Dengan demikian layanan pendidikan tidak lagi didasarkan atas label kecacatan anak, akan tetapi didasarkan pada hambatan belajar dan kebutuhan setiap individu anak. Oleh karena itu layanan pendidikan anak penyandang cacat tidak harus di sekolah khusus, tetapi bisa dilayani di sekolah reguler terdekat dimana anak itu berada. Cara berpikir seperti ini dilandasi oleh konsep Special needs education, yang antara lain melatarbelakangi munculnya gagasan pendidikan inklusif (UNESCO, 1994).

Dalam konsep special needs education, sangat dihindari penggunaan label kecacatan, akan tetapi lebih menonjolkan anak sebagai individu yang memiliki

kebutuhan yang berbeda-beda. Sejalan dengan perubahan cara berpikir seperti digambarkan di atas, maka Anak Luar Biasa (Exceptional Children) tidak lagi dipandang dari kategori kecacatannya akan tetapi harus dilihat dari hambatan belajar yang dialami dan kebutuhan-kebutuhan akan layanan pendidikannya. Oleh karena itu anak luar biasa menjadi bagian dari Anak Berkebutuhan Khusus (Children with Special Needs). Dengan kata lain Anak berkebutuhan khusus bukan pengganti istilah anak luar biasa. Layanan pendidikan bagi semua anak berkebutuhan khusus, termasuk anak luar biasa adalah Pendidikan Kebutuhan Khusus (Special Needs Education).